



PEMERINTAH KOTA BOGOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH

Jl. Kapten Muslihat No. 21, Telp/Fax (0251) 8338052
KOTA BOGOR – 16121

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 800/05016 - TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KOTA BOGOR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 151);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 163);

9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas, Tata Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor;
11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor;
12. Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2025 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor;

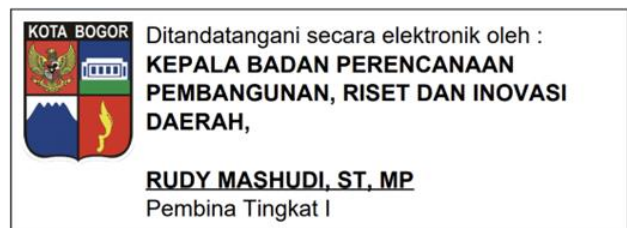
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana

Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bogor;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 12 Desember 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 800/05016 - TAHUN 2025

TANGGAL : 12 DESEMBER 2025

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025 – 2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama								Sumber Data
		Uraian Indikator Kinerja	Formulasi/Cara Perhitungan	Satuan	Target					
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Bappeda Kota Bogor	Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah	Menyesuaikan LHE AKIP dari Inspektorat Daerah Kota Bogor	Predikat	AA (90,95)	AA (91,00)	AA (91,50)	AA (92,00)	AA (92,50)	Bapperida
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	Bedasarkan Berita Acara Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit BPK/Itda	Persen	100	100	100	100	100	Inspektorat Kota Bogor
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	Presentase Penilaian atas kepatuhan pengelolaan keuangan yang terealisasi di bagi target Penilaian atas kepatuhan pengelolaan keuangan di kali 100	Indeks	3,7	3,74	3,78	3,82	3,86	Bapperida

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama								Sumber Data
		Uraian Indikator Kinerja	Formulasi/Cara Perhitungan	Satuan	Target					
					2026	2027	2028	2029	2030	
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang dihasilkan dalam satu tahun	Inovasi	1	1	1	1	1	Bapperida
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP Tingkat Kota aspek Perencanaan Kinerja	Menyesuaikan LHE AKIP Tingkat Kota Aspek Perencanaan Kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Nilai	24,65	24,75	24,85	24,95	25,05	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Nilai Sakip Tingkat Kota Aspek Pengukuran Kinerja	Menyesuaikan LHE AKIP Tingkat Kota Aspek Pengukuran Kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Nilai	25	25,1	25,15	25,2	25,25	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3	Termanfaatkannya hasil litbang jirap,serta invensi dan inovasi sebagai landasan perencanaan	Nilai IKK dimensi Perencanaan, transparansi dan keterlibatan analisis Kebijakan	Sesuai Surat Edaran Kepala LAN No 22/K.1.HKM.02.2/2021 dengan indikator pembangun Dimensi Perencanaan Kebijakan	Poin	39,05	39,6	41,25	42,35	44	Lembaga Administrasi Negara RI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama								Sumber Data
		Uraian Indikator Kinerja	Formulasi/Cara Perhitungan	Satuan	Target					
					2026	2027	2028	2029	2030	
	pembangunan daerah.	Nilai IKK dimensi implementasi dan evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	Sesuai Surat Edaran Kepala LAN No 22/K.1.HKM.02.2/2021 dengan indikator pembangun Dimensi Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	Poin	31,95	32,4	33,75	34,65	36	Lembaga Administrasi Negara RI
4	Meningkatnya kematangan inovasi daerah dalam rangka menunjang pelayanan publik yang berkualitas	Persentase inovasi yang berkelanjutan	Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang di terapkan lebih dari 2 tahun dibagi jumlah seluruh inovasi Perangkat Daerah kumulatif dari tahun 2014 sampai tahun ke n dikali 100%.	Persen	96,6	97	97,5	98	98,5	Bapperida


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
 DAERAH,**
RUDY MASHUDI, ST, MP
 Pembina Tingkat I